

INTISARI

ANALISIS IMPLEMENTASI PROSEDUR PENCAIRAN DANA LANGSUNG (LS) DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA

CHORNELIA BELLA KUSUMA

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertipe A1 mempunyai fungsi menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah. Salah satu tujuan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Yogyakarta Negara adalah mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam penyaluran dana. Pencairan dana menjadi hal yang sangat penting karena dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan operasional satuan kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses yang terjadi saat pencairan dana Langsung sesuai dengan prosedur atau tidak. Selain itu, untuk mengetahui keefektifan prosedur yang telah ditetapkan oleh KPPN Yogyakarta. Penulis melakukan analisis pada proses pencairan dana Langsung (LS) khususnya yang bersifat kontraktual dan non kontraktual. Metode analisis yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan metode tersebut, analisis yang dilakukan yaitu mengamati langsung setiap proses yang terjadi di setiap bagiannya dan membandingkannya dengan *Standard Operating Procedure* yang telah ditetapkan di KPPN Yogyakarta.

Proses pencairan dana Langsung (LS) khususnya yang bersifat kontraktual dan non kontraktual telah efektif karena telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KPPN. Dengan menerapkan prosedur tersebut yang dipadukan dengan Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara proses pencairan dana berjalan lebih baik dan sangat teliti. Dengan begitu diperlukan lagi bimbingan teknis kepada satuan kerja mengenai format pengajuan SPM untuk pencairan dana. Bimbingan teknis tersebut bertujuan untuk dapat meminimalisir kesalahan pengajuan sehingga proses pencairan dana tidak akan terhambat.

Kata kunci: pencairan dana langsung, kontraktual, non kontraktual

ABSTRACT

ANALYSIS OF DIRECT FUNDS DISBURSEMENT PROCEDURE IMPLEMENTATION IN YOGYAKARTA TREASURY OFFICE

CHORNELIA BELLA KUSUMA

Yogyakarta Treasury Office as an A1 vertical instantiation of Directorate General of Treasury has a function to guarantee continuity of the Indonesian budget disbursement targeted, punctually and appropriate in amount. One of Yogyakarta Treasury Office goals is realizing first-rate service to the community in the disbursement of funds. Disbursement of funds becomes very important because these funds are used to finance various operational activities work unit.

This study aims to determine the process that occurs when the direct disbursement of funds in accordance with the procedure or not. In addition, to determine the effectiveness of the procedures established by the Yogyakarta Treasury Office. The author conducted an analysis on the direct disbursement process (LS), in particular, contractual and non-contractual. The method of analysis used by the writer is descriptive qualitative method. With this method, the analysis conducted by the writer is directly observe every process that occurs in every part of it and compare it with the Standard Operating Procedure that have been set in Yogyakarta Treasury Office.

Contractual and non-contractual process of Direct funds disbursement (LS) in particular has been effective because it is already in accordance with the procedure established by the Yogyakarta Treasury Office. By applying these procedure that is combined with Treasury System State Budget, funds disbursement process runs better and very accurate. Therefore, the technical guidance to the unit regarding the SPM submission format for the disbursement of funds is needed again. The technical guidance aims to minimize errors submission with the result that the disbursement process will not be hampered.

Keywords: direct funds disbursement, contractual, non contractual